

ANALISIS EKONOMI PENGEMBANGAN KAWASAN BUNTAGO

Djarwadi dan Alkadri
Pengkajian Kebijakan Teknologi

Abstract

Buntago Zone consists of Buntok, Tanjung and Tanah Grogot is the area each other adjacent and border on the Province Central of Kalimantan, South of Kalimantan and East of Kalimantan. Buntok is "Kawasan Andalan" in Barito Regency, Tanjung is one of the Local Activity Center (PKL) support zone for "Kawasan Andalan" Kandungan in Tabalong Regency, and Tanah Grogot is Capital city of Pasir Regency is Regional Activity Center (PKW) support zone for "Kawasan Andalan: Bonsamtebajam. The development plan of Buntago is expected to become a coordinating tool and also a basic preparation for inter sectoral and inter regional development programs. The usage of this plan is also to regulate interregional potencies in order to optimize their contribution for the development of community economic welfare. Buntago zone have the prospect to be developed mutual profit together with pre-eminent commodity palm coconut and rubber. The development plan of Buntago zone divided into two scenarios. Stage 1 is the scenario for the management of development basics (2006-2010) and stage 2 is the scenario of development growth acceleration (2011-2015). The need of investment projected for funding this development is over 25 billion IDR. The investment needed for funding in the stage 1 is amount of 7 billion IDR, and for the stage 2 is 17 billion IDR. In order to support the development of Buntago, the government is projected to give 80% of total budget needed in the stage 1 and 60% in the stage 2, while the rest will be covered by private sector.

Kata kunci : analisis ekonomi, alokasi dan sumber pembiayaan investasi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks pengembangan wilayah, kenyataannya saat ini menunjukkan masih banyaknya kesenjangan dalam hal pengembangan dan atau pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain, daerah atau kawasan yang memiliki sumber daya yang cukup atau berlebih memiliki tingkat perkembangan yang tinggi, sedangkan daerah atau kawasan lainnya memiliki perkembangan yang kurang menggembirakan walaupun terkadang dua daerah tersebut terletak bersebelahan secara administrasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut terutama untuk kawasan yang memiliki potensi sumber daya yang beragam adalah dengan mensinergikan satu kawasan dengan kawasan lainnya sehingga lahir satu kawasan yang mantap dan dapat saling mengisi antara kelebihan dan kekurangannya.

Pembangunan wilayah pada dasarnya adalah upaya pemanfaatan sumberdaya wilayah yang memerlukan perhatian, khususnya terhadap berbagai kondisi dan menyangkut aspek sosial

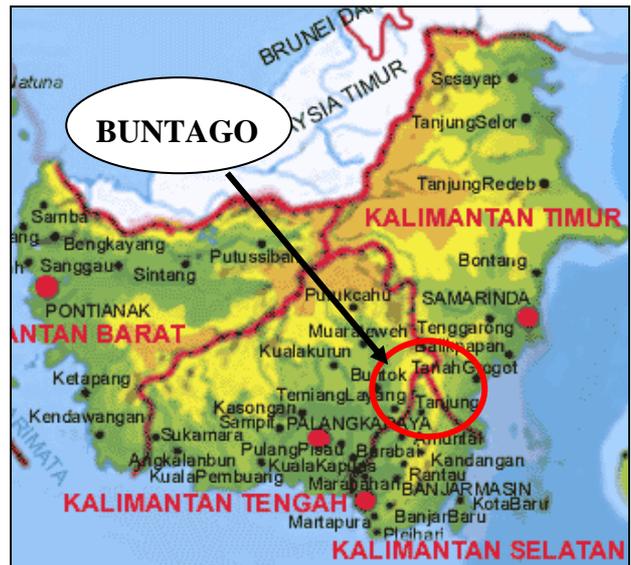
budaya, pertahanan dan keamanan suatu wilayah. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri. Pembangunan di suatu wilayah akan berdampak pada wilayah lainnya, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung secara fisik. Oleh karena itu perlu adanya integrasi dan keterpaduan pengembangan di wilayah-wilayah yang berbatasan tersebut.

1.2. Pendekatan

Kawasan-kawasan yang lokasinya saling berbatasan umumnya memiliki interaksi atau keterkaitan yang lebih erat dibanding kawasan yang lokasinya berjauhan. Akan tetapi apabila berada dalam wilayah administratif yang berbeda memiliki kemungkinan terjadi konflik atau ketidakterpaduan dalam pembangunannya, karena aparat pemerintah yang berwenang dan mengelola berbeda. Berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu fenomena kesenjangan antar wilayah, tujuan keterpaduan dan integrasi wilayah, serta untuk mensinergikan berbagai wilayah, terutama untuk kawasan-kawasan yang berbatasan namun berada dalam wilayah administratif yang berbeda,

seperti halnya Buntago (lihat gambar 1), maka dalam penyusunan metodologinya, ada beberapa prinsip yang dijadikan acuan, yaitu:

- *Prinsip percepatan pertumbuhan ekonomi*, yaitu mendorong sektor unggulan (*leading sektor*) sebagai sektor penggerak (*prime mover*) kegiatan ekonomi kawasan Buntago untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- *Prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan*. Melalui upaya ini, pemerataan pembangunan kawasan Buntago yang berbasis sektor industri, perdagangan dan jasa diharapkan tidak menimbulkan dampak terhadap keseimbangan system ekologis.
- *Prinsip kemitraan*, agar pemerintah dan sektor swasta berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Pengembangan kawasan Buntago harus memperhatikan konteks adat dan budaya masyarakat dikawasan yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya. Selain itu, dinas dan instansi yang terkait dalam satu kesatuan kawasan Buntago (Buntok, Tanjung dan Tanah Grogot) harus bekerja sama dalam prinsip kemitraan, meskipun berbeda dalam kewenangan propinsi yang berbeda.
- *Prinsip kelembagaan*, dimulai dengan identifikasi pelaku pembangunan/*stakeholders* (unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) yang terkait dengan kegiatan klaster yang akan dikembangkan dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Dalam hal ini diperlukan fasilitas dialog diantara mereka untuk menghasilkan ide dan inisiatif



Gambar 1 Peta Geografi Kawasan Buntago

2. BAHAN DAN METODE

Salah satu prinsip yang diterapkan dalam pengembangan Kawasan Buntago adalah percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menjadikan sektor unggulan (*leading sector*) sebagai motor penggerak (*prime mover*) perekonomian kawasan.

Berikut ini dipaparkan secara singkat perkembangan ekonomi yang telah diraih oleh Kawasan Buntago dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ekonomi disini akan ditinjau dari sisi struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi nilai tambah, pendapatan perkapita, perdagangan luar negeri, dan investasi.

Table 1 Perkembangan struktur ekonomi Kawasan Buntago menurut harga berlaku, 2002-2004 (%)

Lapangan usaha	2002	2003	2004	Rata2
Pertanian	29.78	30.35	29.63	29.92
Pertambangan dan Penggalian	43.36	41.55	42.17	42.36
Industri pengolahan	2.98	3.07	3.00	3.01
Listrik dan Air Bersih	0.17	0.18	0.18	0.18
Bangunan	4.68	5.08	5.20	4.99
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.94	8.42	8.48	8.28
Pengangkutan dan Komunikasi	3.11	3.22	3.19	3.17
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.99	2.08	2.24	2.10
Jasa-jasa	5.99	6.04	5.92	5.98
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : diolah dari BPS, berbagai sumber

2.1. Struktur Ekonomi Kawasan Buntago

Struktur ekonomi Kawasan Buntago sampai dengan tahun 2004 didominasi oleh dua sektor primer, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kedua sektor ini memberikan kontribusi pada perekonomian kawasan, masing-masing sebanyak 29,63% dan 42,17% pada tahun 2004. Sementara itu peranan tujuh sektor lainnya, masing-masing hanya di bawah sepuluh persen (10%) dan yang paling kecil kontribusinya adalah listrik dan air bersih (0,18%).

Sepanjang 2002-2004 struktur ekonomi Kawasan Buntago memang belum menunjukkan pergeseran yang signifikan. Sektor primer memang mengalami penurunan kontribusi dari 73,45% menjadi 71,80%, namun tetap dominan. Pangsa sektor sekunder (industri pengolahan) sempat meningkat dari 2,98% menjadi 3,07%, tetapi kembali menurun menjadi 3,00%. Sedangkan peranan sektor tersier hanya bertambah dari 23,87% menjadi 25,20%.

Peningkatan peran sektor tersier yang cukup baik adalah pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu dari 7,94% pada tahun 2002 menjadi 8,42% pada tahun 2003 dan 8,48% pada tahun 2004. Sektor bangunan meningkat dari 4,68% menjadi 5,08% dan 5,20% pada tahun 2003 dan 2004. Dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga mengalami peningkatan dari 1,99% pada tahun 2002 menjadi 2,08% dan 2,24% pada tahun 2003 dan 2004.

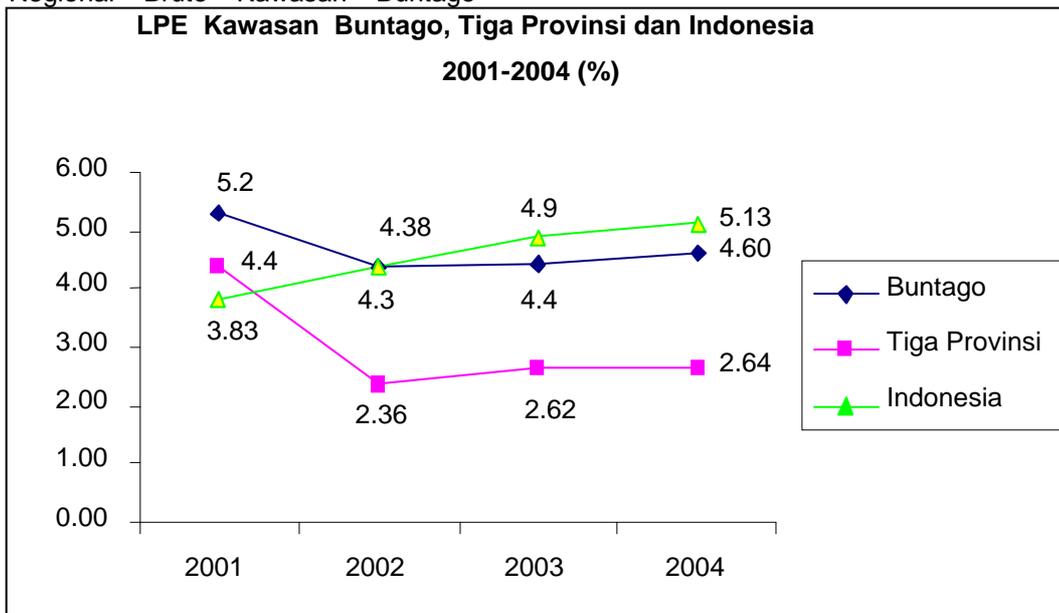
2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Buntago

Berdasarkan harga konstan 2000, Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Buntago

senantiasa meningkat sepanjang periode waktu 2000-2004. Begitu pula halnya dengan PDRB gabungan tiga provinsi dan PDB Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dapat disimak secara lengkap dalam Tabel 2. Sementara itu kontribusi PDRB Kawasan Buntago terhadap PDB nasional sepanjang jangka waktu 2000-2004 sangat kecil dan tidak mengalami perubahan, yaitu hanya 0.33% pada tahun 2000 sampai dengan 2004. sedangkan kontribusi PDRB Kawasan Buntago terhadap PDRB gabungan tiga provinsi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 perannya baru 4,10%, maka pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat dan mencapai angka 4,37% pada tahun 2004. Berdasarkan kondisi ini memberikan isyarat bahwa perekonomian kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago mulai bangkit di level regional.

Seiring dengan pertambahan PDRB di atas, laju pertumbuhan ekonomi yang di raih Kawasan Buntago juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awalnya tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan ini 5,29% pada tahun 2001 dan merosot menjadi 4,37% pada tahun 2002. Namun pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren yang meningkat. Demikian halnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi gabungan tiga provinsi dengan kecenderungan mirip Kawasan Buntago.

Pada tahun 2001 tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hanya 3,83%, yang berarti lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Buntago maupun gabungan tiga provinsi. Akan tetapi memasuki tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,23%, sehingga melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi kedua kawasan tersebut.



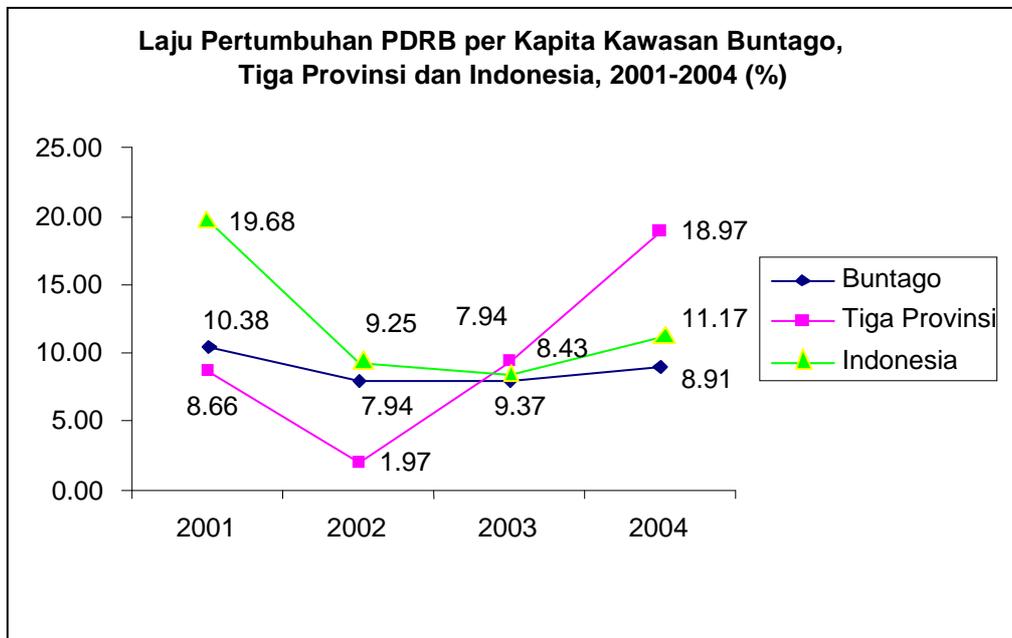
Gambar 2 Laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Buntago, tiga provinsi dan

2.3. Pendapatan Per Kapita Kawasan Buntago

Lebih tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dibanding pertumbuhan penduduk, telah menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Buntago semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh bertambah besarnya nilai PDRB per kapita kawasan ini sepanjang tahun 2000-2004. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita Kawasan Buntago dari Rp.8.187.272 pada tahun 2000 naik menjadi Rp.11.466.605 pada tahun 2004. Pencapaian ini menempatkan PDRB per kapita Kawasan Buntago di atas rata-rata PDB per kapita nasional. Namun demikian PDRB per kapita Kawasan Buntago hanya sekitar separuh PDRB per kapita gabungan tiga provinsi, yang sebesar Rp.15.104.324 pada tahun 2002 dan

Rp.21.776.199 pada tahun 2004. Meskipun nilai PDRB per kapita Kawasan Buntago lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita nasional, akan tetapi laju pertumbuhannya masih di bawah tingkat pertumbuhan PDB per kapita nasional bahkan pada tahun 2003 dan 2004 juga di bawah PDRB per kapita gabungan tiga provinsi.

Menjelang tahun 2002, laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kawasan Buntago, tiga provinsi dan nasional mengalami penurunan. Penurunan paling tajam dialami oleh PDB per kapita nasional yaitu menjadi 9,25% dari 19,68%. Namun menjelang tahun 2003 pendapatan per kapita Kawasan Buntago, tiga provinsi dan nasional terus meningkat, dimana PDRB per kapita tiga provinsi lebih cepat pertumbuhannya dibanding PDB per kapita Nasional maupun PDRB per kapita Kawasan Buntago.



Gambar 3 Laju pertumbuhan PDRB per kapita Kawasan Buntago, tiga provinsi dan Indonesia

Tren laju pertumbuhan ekonomi seperti diatas mengindikasikan bahwa daya saing Kawasan Buntago maupun gabungan tiga provinsi mengalami penurunan, terutama dalam penciptaan nilai tambah bruto. Penurunan daya saing tersebut telah menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di kawasan yang bersangkutan menjadi lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional.

2.4. Kapasitas Fiskal Kawasan Buntago

Kapasitas fiskal merupakan sebuah parameter yang menggambarkan kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya. Kapasitas fiskal dicerminkan melalui penerimaan

APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk mebiayai pengeluaran tertentu, tidak termasuk untuk belanja pegawai). Perhitungan Kapasitas fiskal setiap daerah didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

dimana :

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
- DAU = Dana Alokasi Umum

- PL** = Penerimaan Lain-lain yang Syah, kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan Penerimaan lain yang dibatasi penggunaannya
- BP** = Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa kapasitas fiskal Kawasan Buntago pada tahun 2003 secara agregat termasuk kategori tinggi. Kapasitas fiskal yang dimiliki rata-rata adalah Rp.8.812.542,- Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Pasir memiliki kapasitas fiskal yang terbesar di Kawasan Buntago yaitu

sebesar Rp.14.789.047,- (tinggi). Sementara itu Kabupaten Barito Selatan memiliki kapasitas fiskal terkecil yaitu Rp.4.745.310,- (sedang).

Kapasitas fiskal kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago pada tahun 2005 mengalami peningkatan kecuali Kabupaten Tabalong. Peningkatan ini ditunjukkan oleh indeks kapasitas fiskal yang diraih pada tahun tersebut. Kabupaten Barito Selatan memiliki indeks 1,7650 (tinggi), Kabupaten Barito Timur memiliki indeks 1,7791 (tinggi), Kabupaten Tabalong memiliki indeks 1,4213 (tinggi) dan Kabupaten Pasir dengan indeks 3,0463 (sangat tinggi).

Table 2 Kapasitas fiskal kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago

Vatiable	Barito Selatan	Barito Timur	Tabalong	Pasir	BUNTAGO
PDRB	673.080	415.164	1.653.816	2.462.284	5.204.344
Penerimaan Daerah	158.704	101.699	215.210	515.667	991.271
PAD	4.923	975	14.057	34.674	54.629
Dana Perimbangan	153.781	97.104	183.503	483.285	872.673
Bagi hasil Pajak	25.870	18.640	31.149	34.069	109.548
Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	4.188	2.415	28.027	238.708	273.357
Dana Alokasi Umum	108.773	65.361	113.740	124.339	412.213
Dana Alokasi Khusus	14.950	10.868	10.587	41.149	77.555
Lain-lain Penerimaan yang Syah	0	3.620	17.641	42.708	63.969
Belanja Pegawai	77.794	41.458	106.212	72.256	297.720
Jumlah Penduduk Miskin	13.900	10.100	18.700	27.200	69.900
Kapasitas fiskal (2003)	4.745.310	4.888.357	5.262.160	14.789.047	8.812.542
Kategori	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indeks Kapsitas fiskal (2005)	1,7650	1,7791	1,4213	3,0463	2,0029
Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : diolah dari beberapa sumber

2.5. Perdagangan Luar Negeri (Ekspor) Kawasan Buntago

Kawasan Buntago hanya memiliki pelabuhan ekspor di Kabupaten Pasir yaitu Pelabuhan Pasir/Tanah Grogot dan Adang Bay. Oleh sebab itu fasilitas ekspor Kawasan Buntago praktis hanya

mengandalkan pelabuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasir. Berdasarkan data dari pelabuhan Pasir/Tanah Grogot dan Pelabuhan Adang Bay bahwa ekspor Kawasan Buntago terus meningkat., dari US\$ 71.263 ribu pada tahun 2001 menjadi US\$ 128.129 ribu pada tahun 2003 dan menjadi US\$ 251.504 ribu pada tahun 2005.

Table 3 Perkembangan ekspor Kawasan Buntago, menurut pelabuhan 2001 – 2005 (US\$ ribu)

WILAYAH/PELABUHAN	2001	2002	2003	2004	2005
KWS BUNTAGO	71.263	92.836	128.129	173.677	251.504
Pasir/Tanah Grogot	71.257	92.649	128.129	60.694	3.046
Adang Bay	5	187	0	113.083	248.457
TIGA PROVINSI	9.991.168	8.957.834	10377.247	12.694.367	16.635.113
Kal Tengah	96.49	69.690	74.233	87.060	125.322
Kal Selatan	1.033.330	1.059.960	1.197.762	1.596.301	2.067.568
Kal Timur	8.861.352	7.828.184	9.105.253	11.011.007	14.442.222
INDONESIA	56.320.905	57.158.772	61.058.247	71.584.609	85.659.953

Sumber : diolah dari BPS, Statistik Ekspor

Ekspor Kawasan Buntago pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 baru mampu memberikan kontribusi pada ekspor nasional rata-

rata sebesar 0,19% per tahun. Kontribusi ini memang masih kecil, namun memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun

2001 peranan ekspor Kawasan Buntago baru 0,13%, pada tahun 2003 meningkat menjadi 0,21% dan pada tahun 2005 menjadi 0,29%

Sementara itu, peranan ekspor Kawasan Buntago terhadap ekspor gabungan tiga provinsi juga terus meningkat. Pada tahun 2001 peranan ekspor Kawasan Buntago terhadap ekspor gabungan tiga provinsi meningkat menjadi 0,87% dan pada tahun 2005 menjadi 1,51%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proyeksi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang rentang waktu 2001-2004, kecenderungan tingkat pertumbuhan ekonomi

yang diraih empat kabupaten di Kawasan Buntago relative lamban, yakni rata-rata 4,6% per tahun. Pencapaian yang relative rendah ini menjadikan tantangan yang cukup besar dalam mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

Pada kurun waktu 2006-2015, tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan Buntago diproyeksikan dalam dua skenario. Skenario pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh kawasan diproyeksikan hanya sebesar 4,67% per tahun sesuai dengan kecenderungan prestasi yang dicapai selama periode 2001-2004 dengan kapasitas fiskal yang termasuk kategori tinggi, maka dalam skenario kedua laju pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut diproyeksikan sekitar 8,17% setiap tahunnya.

Table 4 Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago 2006-2015 (%)

Kabupaten	Rata2 LPE 2001-2004	Indeks Kapasitas fiskal 2005	Proyeksi Rata2 LPE	
			Normal	Akselerasi
Barito Selatan	1.98	Tinggi	1.98	2.97
Barito Timur	2.03	Tinggi	2.03	3.05
Tabalong	5.18	Tinggi	5.18	9.06
Pasir	5.61	Sangat Tinggi	5.61	9.81
Kawasan Buntago	4.67	Sangat Tinggi	4.67	8.17

Sumber : Hasil Perhitungan

3.2. Analisis Sektor Unggulan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan per kapita merupakan tolok ukur utama bagi pembangunan suatu daerah. Sedangkan tolok ukur lainnya seperti struktur politik, kepastian hukum, kelembagaan social, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup berperan untuk menjamin kesinambungan kemajuan dan pemerataan dari waktu ke waktu. Sasaran utama yang banyak dicangkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya adalah meningkatkan pertumbuhan produktivitas (*productivity growth*), pemerataan distribusi pendapatan (*income distribution*), memperluas kesempatan berusaha dan menekan tingkat pengangguran (*unemployment rate*), serta

menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (*sustainable development*).

Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, ada berbagai macam konsep yang bisa diterapkan. Salah satu diantaranya adalah pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan. Konsep ini menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah dengan atau kawasan pada sektor-sektor yang dinilai bisa menjadi unggulan, baik tingkat domestik maupun internasional.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa sepanjang rentang waktu 201-2004 Kawasan Buntago memiliki keunggulan ditingkat gabungan tiga provinsi dalam empat sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Keunggulan ini diindikasikan oleh nilai rata-rata LQ yang melebihi angka satu.

Table 5 Perkembangan LQ sektor-sektor ekonomi di Kawasan Buntago 2001-2004

Sektor/ subsektor	2001	2002	2004	2004	Rata-2
Pertanian	1.45	1.43	1.42	1.44	1.44
Pertambangan dan penggalian	1.54	1.48	1.49	1.51	1.48
Industri Pengolahan	0.16	0.17	0.18	0.18	0.17
Listrik dan Air Bersih	0.59	0.55	0.51	0.51	0.55
Bangunan	1.28	1.27	1.34	1.35	1.31
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.74	0.78	0.78	0.74	0.76
Pengangkutan dan Komunikasi	0.72	0.71	0.72	0.71	0.72
Keuangan, persewaan, jasa perusahaan	1.02	1.04	0.91	0.92	0.98
Jasa-jasa	1.36	1.31	1.24	1.19	1.31

Sumber ; diolah dari beberapa sumber

Keunggulan Kawasan Buntago dalam sektor pertanian terutama berasal dari subsektor

tanaman perkebunan. Ada dua komoditas utama yang menjadi unggulan, yaitu Karet dan Kelapa

Sawit. Karet sebagian besar diusahakan di Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pasir. Sedangkan Kelapa Sawit dikembangkan sebagian besar di Kabupaten Pasir, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan.

3.3. Analisis Kebutuhan Investasi

Salah satu langkah mempercepat pengembangan Kawasan Buntago agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah sekitarnya adalah dengan mendorong kegiatan investasi di seluruh kawasan tersebut. Investasi ini tidak hanya untuk sektor-sektor produksi, melainkan juga untuk infrastruktur kawasan dan investasi non fisik. Karenanya dibutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit jumlahnya.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun Kawasan Buntago, dapat didekati dengan menggunakan metode proyeksi sederhana yang didasarkan pada model pertumbuhan Harrod-Domar seperti berikut ini :

$$g = i/k$$

dimana ;

- g = persentase tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai
- I = persentase besarnya investasi yang dibutuhkan
- K = perkiraan ICOR (*incremental capital output ratio*)

Untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan berdasarkan formulasi di atas, ada beberapa asumsi yang diajukan, yakni :

1. Proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai daerah di kawasan perbatasan didasarkan pada dua skenario, yakni :
 - a. Skenario 1 (Skenario Penataan Basis-basis Pembangunan), yaitu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata selama periode 2006-2010 yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap daerah kajian sepanjang kurun waktu 2001-

2004. Periode 2006-2010 ini pengembangan Kawasan Buntago difokuskan pada penataan basis-basis pembangunan, mulai dari pengembangan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah yang memadai, pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, hingga penataan kelembagaan dan regulasi.

- b. Skenario 2 (Skenario Akselerasi Pertumbuhan Pembangunan), yaitu proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata untuk rentang waktu 2011-2015 yang didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata selama jangka waktu 2001-2004 yang dipercepat beberapa kali lipat sesuai dengan indeks kapasitas fiskal yang dimiliki setiap daerah pada tahun 2005. Pada rentang waktu 2011-2015 ini, pengembangan Kawasan Buntago harus dipercepat karena basis-basisnya sudah memadai, dimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia terus ditingkatkan, infrastruktur wilayah memiliki daya saing, Sumberdaya alam dimanfaatkan seoptimal mungkin, serta kelembagaan dan regulasi ditata secara efektif dan efisien
2. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang diperkirakan berkisar 4,5-5,0 setiap tahunnya, disesuaikan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki setiap daerah, baik dalam hal prasarana dan sarana (infrastruktur), kemampuan manajemen pembangunan, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia maupun teknologi.

3.3.1. Estimasi Kebutuhan Investasi

Hasil estimasi kebutuhan investasi untuk pengembangan Kawasan Buntago, baik menurut Skenario Penataan Basis-basis Pembangunan maupun skenario Akselerasi Pertumbuhan Pembangunan, ditampilkan secara singkat pada *table* di bawah. Tabel tersebut memperlihatkan proyeksi kebutuhan investasi agregat di Kawasan Buntago dari tahun 2006 sampai dengan 2015.

Table 6 Proyeksi kebutuhan investasi agregat di Kawasan Buntago, 2006-215 (Rp. Miliar)

Tahun	Target LPE (%)	Estimasi PDRB (Rp.miliar)	ICOR	Kebutuhan Investasi (Rp.miliar)
2006	4,67	5.971,16	5,00	1.421,92
2007	4,67	6.255,54	5,00	1.495,23
2008	4,67	6.554,61	5,00	1.572,65
2009	4,67	6.869,14	5,00	1.654,11
2010	4,67	7.199,96	5,00	1.739,94
2011	8,17	7.802,38	4,50	2.958,04
2012	8,17	8.459,72	4,50	3.228,46
2013	8,17	9.177,16	4,50	3.524,35
2014	8,17	9.960,34	4,50	3.848,14
2015	8,17	10.815,49	4,50	4.202,46
Agregat 2006-10				7.883,94
Agregat 2011-15				17.761,45

Sumber : Hasil Estimasi (dinaikin ditaro dibawah)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Kawasan Buntago dalam sepuluh tahun ke depan diproyeksikan mencapai Rp. 25.465,39 miliar, terbagi atas Rp. 7.883,94 miliar untuk periode penataan basis-basis pembangunan dan Rp. 17.761,45 miliar untuk periode percepatan pertumbuhan pembangunan Kawasan Buntago.

3.3.2. Identifikasi Sumber-sumber Pembiayaan Investasi

Merujuk pada berbagai jenis sumber pembiayaan pembangunan yang berkembang saat ini, maka dapat diidentifikasi beberapa alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Buntago seperti berikut :

1. Pembiayaan oleh Pemerintah.
 - Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi (kementerian dan lembaga negara).
 - Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.
 - Belanja Pemerintah Daerah Menurut Organisasi (SKPD).
 - Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Pembiayaan oleh Swasta :
 - Investasi domestik (kredit perbankan dan nonperbankan).
 - Investasi asing.
 - Investasi masyarakat (non-PMDN/PMA).

- Kewajiban Obligasi Publik dan Universal (PSO dan USO)

Berdasarkan sumber-sumber pembiayaan di atas, maka berikut ini dapat diuraikan besarnya kebutuhan investasi untuk setiap sumber pembiayaan di masing-masing kabupaten didalam Kawasan Buntago. Dalam menghitung besarnya pembiayaan investasi oleh pihak pemerintah maupun swasta, diasumsikan bahwa :

- a. Pembiayaan pembangunan oleh pihak pemerintah pada periode 2006-2010 dialokasikan sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan investasi dan kemudian menurun menjadi 60% pada periode 2011-2015. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah ini pun dipilah menjadi :
 - Pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah.
 - Pembiayaan yang berasal dari pendapatan dana perimbangan.
 - Pembiayaan yang berasal dari penerimaan lain yang sah.
- b. Pembiayaan pembangunan oleh pihak swasta, sebaliknya adalah sebesar 20% pada periode 2006-2010 dan kemudian meningkat menjadi 40% pada rentang waktu 2011-2015.

Merujuk pada komposisi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005, maka prosentase alokasi investasi yang ditanggung oleh setiap sumber pembiayaan pemerintah di atas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 7 Estimasi alokasi sumber-sumber pembiayaan investasi di Kawasan Buntago 2006-2015 (%)

PERIODE	KABUPATEN			
	Barito Selatan	Barito Timur	Tabalong	Pasir
PERIODE 2006-2010				
I. Pemerintah	80,00	80,00	80,00	80,00
1. Pendapatan Asli Daerah	3,11	0,72	5,24	3,33
2. Dana Perimbangan	76,89	75,66	70,98	73,80
a. Bagi Hasil Pajak	9,58	7,31	11,77	4,91
b. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	1,02	0,55	4,27	40,75
c. Dana Alokasi Umum	59,49	59,98	49,37	26,04
d. Dana Alokasi Khusus	6,80	7,82	5,56	2,09
3. Lain-lain Penerimaan yang Syah	0,00	3,62	3,78	2,87
II. Swasta	20,00	20,00	20,00	20,00
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
PERIODE 2011-2015				
I. Pemerintah	60,00	60,00	60,00	60,00
1. Pendapatan Asli Daerah	2,33	0,54	3,93	2,50
2. Dana Pembangunan	56,17	56,75	53,24	55,35
a. Bagi Hasil Pajak	7,19	5,48	8,83	3,68
b. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	0,76	0,41	3,20	30,57
c. Dana Alokasi Umum	44,61	44,98	37,03	19,53
d. Dana Alokasi Khusus	5,10	5,87	4,17	1,57
3. Lain-lain Penerimaan yang Syah	1,50	2,72	2,83	2,15
II. Swasta	40,00	40,00	40,00	40,00
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Hasil Estimasi

Berdasarkan prosentase estimasi alokasi sumber-sumber pembiayaan investasi di atas, maka besarnya sumber-sumber investasi masing-masing kabupaten adalah seperti di bawah :

Pada tahap I (2006-2010) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diperkirakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp.299,81 miliar dan yang berasal dari investasi swasta diestimasi sebesar Rp.74,70 miliar. Kemudian pada tahap II (2011-2015) alokasi pemerintah Kabupaten Barito

Selatan sebesar Rp.343,68 miliar dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.229,12 miliar.

Pada tahap I (2006-2010) Pemerintah Kabupaten Barito Timur diperkirakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 199,69 miliar, dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.47,42 miliar. Kemudian pada tahap II (2011-2015) alokasi pemerintah Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.219,30 miliar dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.146,17 miliar.

Tabel 8 Estimasi alokasi sumber-sumber Pmbiayaan investasi di Kawasan Buntago 2006-2015 (Rp.miliar)

PERIODE 2006-2010	Barito Selatan	Barito Timur	Tabalong	Pasir	JUMLAH
I. Pemerintah	298,81	189,69	2.175,54	3.643,11	6.307,15
1. Pendapatan Asli Daerah	11,62	1,71	142,5	151,64	307,47
2. Dana Pembangunan	287,19	179,4	1.930,25	3.360,77	5.757,61
a. Bagi Hasil Pajak	28,63	13,87	256,06	178,88	477,43
b. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	3,05	1,04	92,90	1.484,57	1.581,55
c. Dana Alokasi Umum	177,76	113,78	1.074,06	948,67	2.314,27
d. Dana Alokasi Khusus	20,32	14,83	120,96	76,14	232,25
3. Lain-lain Penerimaan yang Syah	0	8,58	102,79	130,70	242,07
II. Swasta	74,7	47,42	543,89	910,78	1.576,79
JUMLAH	373,51	237,11	2.719,43	4.553,89	7.883,94
PERIODE 2011-2015					
I. Pemerintah	343,68	219,3	3.704,24	6.389,69	10.656,91
1. Pendapatan Asli Daerah	13,35	1,18	145,58	159,74	319,85
2. Dana Pembangunan	321,74	124,45	1.972,14	3.536,69	5.955,02
a. Bagi hasil Pajak	24,71	12,02	327,08	235,14	598,95
b. Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	2,61	0,90	118,54	1.953,33	2.075,38
c. Dana Alokasi Umum	153,32	98,64	1.371,68	1.247,91	2.871,54
d. Dana Alokasi Khusus	17,53	12,87	154,47	100,32	285,19
3. Lain-lain Penerimaan yang Syah	8,59	5,96	104,83	137,38	256,76
II. Swasta	229,12	146,17	2.469,49	4.259,79	7.104,57
JUMLAH	572,80	365,47	6.173,73	10.649,48	17.761,48

Sumber : Hasil Estimasi

Pemerintah Kabupaten Tabalong, pada tahap I (2006-2010) diperkirakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp.2.175,54 miliar, dan yang berasal dari investasi swasta diestimasi sebesar Rp.543,89 miliar. Kemudian pada tahap II (2011-2015) alokasi pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar Rp.3.704,24 miliar dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.2.469,49 miliar.

Pemerintah Kabupaten Pasir pada tahap I (2006-2010) diperkirakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp.1.257,56 miliar, dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.1.018,37 miliar. Kemudian pada tahap II (2011-2015) alokasi pemerintah Kabupaten Pasir sebesar Rp.6.389,69 miliar dan investasi swasta diestimasi sebesar Rp.4.259,79 miliar.

4. KESIMPULAN

Pengembangan kawasan Buntago membutuhkan strategi keberpihakan dari pemerintah kabupaten (Barito Selatan, Barito Timur, Tabalong dan Pasir) maupun provinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan). Keberpihakan ini

diperlukan dalam alokasi sumber dana pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang syah.

Pengembangan kawasan Buntago menggunakan dua (2) skenario dalam 2 tahap. Tahap I (2006-2010) menggunakan skenario Penataan Basis-basis Pembangunan dan tahap II (2011-2015) menggunakan skenario Percepatan Pertumbuhan Pembangunan.

Pengembangan kawasan Buntago selama 10 tahun membutuhkan dana sebesar Rp.25.645,39 miliar yang terbagi tahap I sebesar Rp.7.883,94 miliar dan tahap II sebesar Rp.17.761,45 miliar.

Program-program Prioritas Pengembangan Kawasan Buntago

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan Buntago dalam dua skenario, maka dapat diidentifikasi program-program prioritas adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (2006-2010) disebut tahap penataan basis-basis pembangunan:

- Penetapan arah kebijakan pembangunan sektoral dan spasial dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
- Investasi dan pengelolaan potensi-potensi pengembangan kawasan.
- Investasi dan penanganan masalah-masalah pengembangan daerah.
- Pengembangan iklim pembangunan kawasan yang kondusif.
- Pemberdayaan sumberdaya manusia.
- Perluasan aksesibilitas dan prasarana transport, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air, dan infrastruktur lainnya.
- Penataan dan pemenuhan tugas pokok, fungsi, dan wewenang setiap satuan kerja pemerintah daerah yang masuk ke dalam Kawasan Buntago.
- Pengembangan rantai nilai sektor-sektor unggulan.
- Peningkatan kinerja pelayanan dan pemerataan fasilitas publik sarana dan prasarana.
- Promosi investasi.
- Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
- Penciptaan daya saing wilayah.

2. Tahap II (2011-2015) disebut tahap percepatan pertumbuhan pembangunan:

- Percepatan pengembangan sektor-sektor unggulan.
- Peningkatan kinerja pelayanan dan pemerataan fasilitas publik, sarana dan prasarana.
- Peningkatan aktivitas promosi investasi.
- Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
- Peningkatan daya saing wilayah
- Peningkatan pertumbuhan ekspor produksi lokal
- Peningkatan kerja sama dengan stakeholder di luar kawasan dalam pembangunan sektor-sektor unggulan.

- Peningkatan dan menggiatkan UKM dan ekonomi perdesaan.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi.
- Penciptaan diversifikasi produk-produk industri dan jasa basis komoditas unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

Alkadri dan H M Djayadiningrat, Bagaimana Menganalisis Potensi Daerah? Konsep dan Contoh Aplikasi, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT, Jakarta, 2002.

Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2005

Badan Pusat Statistik, Statistik Ekspor Impor Indonesia 2005

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah Dalam Angka 2005

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur Dalam Angka 2005

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2005

Badan Pusat Statistik Kota Bitung, Perhitungan ICOR Sektoral, Bitung, 2000

Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.02/2006, tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah.